

KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN
MENTERI HUKUM DAN HAM
RABU, 12 JULI 2017

=====

1. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk segera mengimplementasikan rencana dan program strategis dalam rangka menyelesaikan permasalahan overcrowded di berbagai LAPAS/RUTAN, serta melakukan pengawasan yang efektif untuk mengantisipasi berbagai permasalahan-permasalahan, seperti gangguan keamanan dan peredaran Narkotika di LAPAS, baik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun para Petugas Pemasyarakatan.
2. KOMISI III DPR RI meminta Menteri Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan kinerja dalam rangka Pengawasan Orang Asing dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Bebas Visa terhadap beberapa Negara tertentu sebagaimana diatur dalam Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang bebaS visa kunjungan serta tetap mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Keimigrasian.
3. KOMISI III DPR RI menerima penjelasan Menteri Hukum dan HAM RI terkait:
 - a. Tindak Lanjut terhadap LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016;
 - b. Perubahan Pagu Anggaran APBNP 2017 yang sebesar Rp. 1.637.100.000.000,- (Satu Trilyun Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Juta Rupiah) perubahan tersebut belum memenuhi usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang sebesar Rp. 4.968.217.475.000,- (Empat Trilyun Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terhadap kekurangan tersebut dari usulan yang disampaikan, Menteri Hukum dan HAM meminta dukungan Komisi III DPR RI untuk meneruskan kepada Badan Anggaran untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku, mengingat usulan tersebut didasari oleh kebutuhan yang mendesak yang harus segera bisa dipenuhi.